

OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SULTRA GELAR ENTRY MEETING PENILAIAN MALADMINISTRASI 2026

Kamis, 06 Agustus 2026 - sultra

Kendari (ANTARA) 06/08/2026 - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara memulai persiapan pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 melalui kegiatan Entry Meeting yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (4/8).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, dan dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta penyelenggara pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, mengatakan Entry Meeting menjadi langkah awal menyamakan persepsi seluruh penyelenggara pelayanan publik terkait kebijakan, indikator, dan mekanisme Penilaian Maladministrasi Tahun 2026.

Menurutnya, penilaian tersebut merupakan instrumen pengawasan preventif untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian tersebut.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Muhammad Fadlansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel serta menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokus penilaian untuk mempersiapkan pelaksanaannya secara optimal.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi tidak bertujuan mencari kesalahan penyelenggara layanan, melainkan menjadi instrumen pencegahan untuk mengukur kualitas pelayanan secara lebih komprehensif dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Hasil penilaian nantinya akan dituangkan dalam Opini Ombudsman sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, bebas maladministrasi, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan."

Pewarta : M Sharif Santiago/Azis Senong
Editor: M Sharif Santiago
COPYRIGHT © ANTARA 2026